



**JAWABAN PEMERINTAH  
ATAS PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI**

**TENTANG  
KERANGKA EKONOMI MAKRO  
DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL 2012**

**RAPAT PARIPURNA DPR RI**

**Jakarta, 31 Mei 2011**



**JAWABAN PEMERINTAH  
ATAS PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI**

**TENTANG  
KERANGKA EKONOMI MAKRO  
DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL 2012**

**RAPAT PARIPURNA DPR RI**

**Jakarta, 31 Mei 2011**



**JAWABAN PEMERINTAH  
MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPR-RI  
ATAS KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN  
POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2012**

**Saudara Ketua dan Para Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,  
Hadirin yang berbahagia,**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Salam sejahtera bagi kita semua,**

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban konstitusional, melanjutkan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2012.

Selanjutnya perkenankanlah kami atas nama Pemerintah, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua fraksi DPR-RI atas pandangan, saran, dan dukungan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2012, yang telah disampaikan oleh Pemerintah pada tanggal 20 Mei 2011 yang lalu. Pandangan, saran, dan dukungan yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna pada tanggal 25 Mei 2011 yang lalu, merupakan masukan yang sangat berharga bagi penyempurnaan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2012, yang akan dijadikan acuan bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2012.

**Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,**

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2012 memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun program, kegiatan dan langkah-langkah yang tepat, terukur, nyata dan komprehensif dalam menjawab tantangan-tantangan pokok pembangunan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Perlu kita sadari bersama, bahwa meskipun kinerja ekonomi tahun 2012 cukup prospektif, namun kita harus tetap mewaspadaai sejumlah tantangan, baik dari sisi global maupun domestik. Dari sisi global, beberapa tantangan tahun 2012 diantaranya adalah laju

pemulihan ekonomi global yang belum merata, masih berlanjutnya krisis Eropa, serta potensi tingginya harga minyak mentah dan harga komoditas pangan. Sedangkan dari sisi domestik, salah satu tantangan berat tahun 2012 adalah perlunya dilakukan perbaikan mendasar terhadap iklim investasi dalam rangka meningkatkan investasi langsung (*Foreign Direct Investment*) guna mendukung peningkatan kinerja sektor riil dan pembukaan akses lapangan kerja baru.

Kebijakan alokasi anggaran dalam APBN diarahkan pada upaya mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengurangan kesenjangan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012, yaitu ***"Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat"***.

Pencapaian sasaran pembangunan dalam tahun 2012 akan dilakukan melalui strategi empat jalur, yaitu mendorong pertumbuhan (*pro-growth*), memperluas kesempatan kerja (*pro-job*), menanggulangi kemiskinan (*pro-poor*), serta merespon dan memitigasi perubahan iklim (*pro-environment*). Pemerintah sependapat dengan pandangan Dewan yang terhormat, mengenai perlunya pembangunan tahun 2012 diarahkan pada sektor-sektor produktif, yang dapat memperluas lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan pembangunan dan prioritas alokasi anggaran dalam tahun 2012 juga akan diarahkan untuk peningkatan kualitas dan perluasan akses dan layanan pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta peningkatan daya saing bangsa di lingkungan internasional. Penetapan besaran defisit didasarkan pada tetap terjaganya konsolidasi dan kesinambungan fiskal, serta memperhatikan kemampuan keuangan negara untuk bisa menutup defisit tersebut dari sumber-sumber pembiayaan yang tidak memberatkan di masa kini dan mendatang.

### **Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,**

Kini perkenankanlah kami memberikan tanggapan dan jawaban terhadap berbagai hal yang telah disampaikan oleh Sdr. H. Hikmat Tomet, MM mewakili Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG); Sdr. Ir. Dolfie OFP mewakili Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP); Sdr. Andi Rahmat, SE mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS); Sdr. Drs. Laurens Bahang Dama mewakili Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN); Sdr. Drs. H. Wan Abu Bakar, Ms. M.Si mewakili Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP); Sdr. Chusnunia mewakili Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-PKB); Sdr. Drs. Ali Kastela, M.MT mewakili Fraksi Partai Hanura (F-Hanura); Sdr. Ir. Sadar Subagyo mewakili Fraksi Partai Gerindra (F-Gerindra) dan Sdr. Achsanul Qosasih mewakili Fraksi Partai Demokrat (F-PD).

Menanggapi pertanyaan F-PG, F-PKB, F-Hanura, F-PDIP, dan F-PKS mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi dapat di jelaskan sebagai berikut.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa terlepas dari pengaruh berbagai faktor eksternal dan internal. Kinerja investasi dan ekspor sangat dipengaruhi oleh pulihnya kondisi perekonomian dan volume perdagangan dunia. Dari sisi eksternal, proyeksi pertumbuhan volume perdagangan dunia yang melambat pada tahun 2012 dari 7,4% menjadi 6,9% perlu diwaspadai. Demikian pula dampak krisis Eropa masih berpotensi mempengaruhi pemulihan ekonomi global. Namun demikian, pengaruh eksternal yang dihadapi Indonesia mungkin akan relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Singapura dan Malaysia.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi diatas 6,5-6,9% pada tahun 2012 merupakan tantangan yang cukup besar. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi telah diperkirakan pada level yang cukup tinggi. Konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah diperkirakan masing-masing tumbuh 4,8-5,2% dan 6,0-6,4%. Investasi telah diperkirakan tumbuh double digit 10,0–10,4% sehingga membutuhkan dana sekitar Rp2.800 triliun. Dari sisi perdagangan internasional, meskipun volume perdagangan dunia diperkirakan melambat di tahun 2012, ekspor-impor diperkirakan tetap meningkat masing-masing sebesar 14,9-15,3% dan 18,0-18,4%. Beberapa langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain adalah meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengendalian laju inflasi dan mendorong realisasi penyerapan anggaran, memperbaiki iklim investasi, dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia (5,2%), Thailand (4,5%), Filipina (5,0%), dan Singapura (4,4%). Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Pemerintah telah menyiapkan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif pada tahun 2012. Kebijakan alokasi anggaran ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memperluas penciptaan lapangan kerja, dan mengurangi angka kemiskinan. Kebijakan-kebijakan tersebut tercermin dalam peningkatan alokasi yang cukup signifikan untuk pembangunan infrastruktur, berlanjutnya berbagai program pengentasan kemiskinan dan bantuan subsidi untuk pertanian. Keseluruhan kebijakan tersebut akan mendukung upaya untuk memperluas lapangan kerja dan selanjutnya diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan jumlah penduduk miskin.

Selanjutnya menjawab pertanyaan dan tanggapan dari F-PG, F-Hanura dan F-PDIP mengenai perlunya perhatian terhadap sektor pertanian dan industri manufaktur perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

Pemerintah terus berupaya dan konsisten mendorong sektor-sektor tersebut agar terus meningkat melalui berbagai program seperti revitalisasi di sektor pertanian (berupa

intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian melalui subsidi pupuk, pengadaan bibit & benih, budidaya produk pertanian unggulan dan sebagainya). Selain itu, Pemerintah juga mengupayakan melalui kebijakan yang berpihak pada pengembangan industri nasional seperti program peningkatan daya saing industri nasional, pemberlakuan SNI, serta pemberian insentif khusus.

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat vital mengingat perannya yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan sektor pertanian cenderung meningkat sejak tahun 2005. Memang ada perlambatan akibat faktor perubahan cuaca ekstrim dalam dua tahun terakhir, namun Pemerintah meyakini bahwa ke depan sektor pertanian mampu tumbuh lebih baik. Pertumbuhan PDB sektor pertanian tahun 2012 diperkirakan sebesar 3,9%-4,3%, lebih tinggi dibandingkan perkiraan tahun 2011 yang tumbuh sebesar 3,7%, bahkan lebih tinggi dari rata-rata selama sepuluh tahun terakhir yang sebesar 3,5%.

Beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani yang telah dilaksanakan dan akan diteruskan antara lain adalah: (i) pemberian subsidi pupuk dan benih seperti: subsidi pupuk, bantuan langsung pupuk (BLP), cadangan benih nasional (CBN), bantuan langsung benih unggul (BLBU); (ii) fleksibilitas harga pembelian pemerintah (HPP), khususnya komoditas padi sehingga para petani mendapat jaminan kepastian harga jual padi yang mereka hasilkan; (iii) proteksi terhadap serbuan impor hasil pertanian, baik melalui instrumen tarif dan non tarif; (iv) pengembangan industri hulu dan industri hilir pertanian di perdesaan berbasis sumber daya lokal; (v) akses petani kepada sumber permodalan yang semakin mudah seperti: kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E), kredit pembangunan energi nabati dan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) dan kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) serta memperluas pemanfaatan kredit usaha rakyat (KUR); dan (vi) pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha kelompok, pengembangan Koperasi Unit Desa maupun koperasi khusus pertanian di perdesaan.

Sektor industri pengolahan pada tahun 2010 masih menjadi penyumbang terbesar terhadap total GDP, yakni sebesar 24,8% dengan pertumbuhan mencapai 4,5%. Pertumbuhan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2009 yang hanya 2,2%. Peningkatan tersebut lebih banyak didorong oleh industri nonmigas, seperti industri makanan, minuman dan tembakau, industri alat angkut mesin dan peralatannya, serta industri lain seperti industri pupuk, kimia dan barang dari karet. Sektor manufaktur pada tahun 2012 diperkirakan terus tumbuh meningkat menjadi 4,8-5,1%, lebih tinggi dari rata-rata selama sepuluh tahun terakhir yang sebesar 4,4%. Untuk meningkatkan pertumbuhan sektor manufaktur, Pemerintah menempuh kebijakan pembangunan industri nasional melalui konsep Klaster dalam konteks membangun daya saing industri yang berkelanjutan.

## **Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,**

Terkait Pertanyaan dan tanggapan dari F-Gerindra, F-PG, F-PKB dan F-PPP mengenai kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Pemerintah telah mampu menurunkan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir. Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan menurun dari 16,6% pada tahun 2007 menjadi 13,3% pada tahun 2010. Dalam tahun 2012 tingkat kemiskinan diperkirakan terus menurun dari 11,5-12,5% pada tahun 2011 menjadi 10,5–11,5%. Sementara itu, tingkat pengangguran menurun dari 9,1 persen pada tahun 2007 menjadi 7,1 persen pada tahun 2010. Tahun 2012 tingkat pengangguran diperkirakan turun menjadi 6,4-6,7%, dari 6,8% pada bulan Februari tahun 2011. Hasil pembangunan ekonomi dewasa ini sebenarnya juga semakin merata dan bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Kondisi ini terlihat dari koefisien Gini Rasio yang terus mengalami penurunan sejak tahun 2008. Pada tahun 2010 misalnya, Gini Rasio turun ke level 0,331 dari 0,357 di tahun 2009, yang menunjukkan semakin meratanya pendapatan masyarakat.

Dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan, pada tahun 2012 Pemerintah tetap melanjutkan program sosial dalam bentuk (i) program Jamkesmas, (ii) Program Keluarga Harapan (PKH), (iii) program PNPM perdesaan, perkotaan, infrastruktur perdesaan, daerah tertinggal dan khusus, serta infrastruktur sosial ekonomi wilayah, (iv) program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan (v) program Raskin.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan jangka menengah dan panjang, Pemerintah juga telah melaksanakan amanat undang-undang, yaitu dengan menganggarkan 20 persen dari total APBN untuk sektor pendidikan. Pemerintah juga meyakini bahwa salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan adalah melalui pendidikan. Berkaitan dengan itu, Pemerintah senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar minimal 9 tahun yang diintegrasikan dengan program-program kesejahteraan lainnya.

Menanggapi pandangan dari F-PKS, F-PG, dan F-PPP terkait dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pemerintah pada dasarnya sependapat dengan seluruh fraksi bahwa pergerakan nilai rupiah perlu terus dijaga agar tetap stabil karena stabilitas nilai tukar memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga daya saing dan aktifitas perekonomian nasional.

Dalam menjaga level nilai tukar rupiah agar tetap stabil, Pemerintah akan selalu melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dengan menjalankan kebijakan stabilitas nilai tukar yang diarahkan untuk meminimalkan volatilitas agar konsisten dengan pertumbuhan dan perkembangan makroekonomi. Kebijakan tersebut sekaligus juga

merupakan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya pembalikan arus modal dengan menjaga cadangan devisa pada level yang memadai untuk memenuhi kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri.

**Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,**

Menanggapi pandangan dari F-PKS, F-PDIP, F-PG, F-PD, F-Gerindra dan F-PPP terkait dengan asumsi inflasi, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pada prinsipnya, Pemerintah sependapat bahwa laju inflasi perlu dijaga pada level yang rendah dan stabil dalam jangka panjang. Laju inflasi yang rendah dan stabil memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan stabilitas perekonomian nasional serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

Namun demikian, perlu kita pahami bersama bahwa ke depan risiko inflasi masih cukup besar karena masih tingginya harga beberapa komoditas utama, seperti minyak, CPO dan bahan pangan. Kondisi iklim dunia yang diperkirakan akan kembali ke pola normal akan dapat mendorong produksi pangan seimbang dengan laju peningkatan permintaan, sehingga diharapkan dapat mempersempit jurang output gap di pasar internasional.

Dalam upaya memitigasi risiko inflasi tersebut, Pemerintah telah menyiapkan berbagai program, antara lain:

- a. penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2011, tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Cuaca Ekstrem, sebagai langkah untuk menyiapkan target program Swasembada Beras 10 juta ton hingga tahun 2015;
- b. penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2011 tentang kebijakan pengamanan cadangan beras yang dikelola oleh pemerintah dalam menghadapi iklim ekstrem;
- c. penyiapan sarana dan prasarana pertanian seperti penyiapan bibit unggul, penanggulangan hama dan penyakit tanaman, serta alokasi subsidi sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, antara lain untuk alokasi Dana Cadangan Stabilitas Harga Pangan dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Terkait dengan permasalahan manajemen stok dan distribusi bahan pangan, terutama bahan pangan pokok seperti beras, Pemerintah telah melaksanakan beberapa kebijakan, diantaranya:

- a. bekerja sama dalam forum TPI dan TPID yang telah terbentuk di lebih dari 55 kota dari target 66 kota yang menjadi acuan dalam survei inflasi BPS untuk pengelolaan cadangan dan distribusi bahan pangan;

- b. bekerja sama dengan aparat penegak hukum, Polri dan Kejaksaan Agung, untuk menindak secara tegas dan menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap aksi spekulasi dan penimbunan barang yang dilakukan oleh pedagang;
- c. mengumumkan secara berkala kepada masyarakat tentang perkembangan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, sehingga dapat meredam ekspektasi harga yang berlebihan di masyarakat;
- d. mengoptimalkan operasi pasar dengan menetapkan harga beras yang terjangkau oleh masyarakat, yaitu berada di bawah harga pembelian beras Pemerintah kepada Bulog.

Terkait dengan sinergi dan koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bersama dengan BI telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk peningkatan upaya bersama dalam pengendalian inflasi nasional. Koordinasi tersebut diarahkan menjadi sinergi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil, baik nasional dan daerah, dalam rangka pengendalian inflasi. Beberapa agenda kegiatan yang telah dan akan terus dilaksanakan adalah:

- a. Pemerintah bekerja sama dengan BI terus melaksanakan sosialisasi kepada pemerintah daerah, baik di forum nasional seperti Musrenbangnas maupun sosialisasi ke daerah, dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang inflasi;
- b. Kerja sama Pemerintah dan BI juga diwujudkan dalam upaya pembentukan forum tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Dengan adanya forum tersebut, upaya pengendalian inflasi diharapkan dapat berjalan lebih efisien dan melibatkan beberapa instansi terkait. Upaya pengendalian inflasi di daerah berjalan semakin baik seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran pemerintah dan masyarakat di sebagian besar daerah akan pentingnya pengendalian inflasi daerah;
- c. Pelaksanaan *High Level Dialogue* dalam rangka penguatan kerja sama antara TPI dan TPID dalam upaya pengendalian inflasi. Dengan adanya forum tersebut, diharapkan dapat terjadi sharing informasi dan pengalaman dalam rangka penanganan inflasi.

**Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,**

Selanjutnya menjawab pertanyaan F-PKS, F-PG, F-PPP, serta F-Gerindra mengenai penghentian lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan, penetapan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, dan tingginya suku bunga pinjaman (*lending rate*) dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penggunaan suku bunga SPN 3 bulan dalam asumsi makro tidak ditujukan untuk mengontrol sektor moneter, melainkan sebagai dasar perhitungan besaran pembayaran bunga SBN dalam APBN. Namun apabila memang diperlukan, Bank Indonesia dapat memakai SPN 3

bulan sebagai salah satu instrumen moneter di kemudian hari. Selama ini, asumsi suku bunga menggunakan acuan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan, namun sejak November 2010 BI sudah tidak melelang lagi SBI 3 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai pengganti suku bunga SBI 3 bulan, asumsi suku bunga yang digunakan di dalam RAPBN 2012 akan mengacu pada suku bunga SPN 3 bulan.

Asumsi suku bunga SPN 3 bulan tersebut telah memperhitungkan tingkat inflasi tahun 2012 yang diperkirakan berada pada kisaran 3,5-5,5 persen. Penerbitan SPN 3 bulan dilakukan dalam jumlah yang wajar bagi kebutuhan *benchmarking* tingkat bunga Surat Berharga Negara (SBN) *variable rate*. Pemerintah sependapat bahwa dalam rangka membantu sektor riil, suku bunga perbankan perlu dikendalikan pada tingkat yang lebih rendah. Namun kiranya perlu menjadi perhatian bersama bahwa suku bunga kredit perbankan tidak berkaitan secara langsung dengan suku bunga SPN yang digunakan sebagai dasar perhitungan postur APBN. Untuk mendorong penurunan tingkat bunga kredit perbankan, Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan otoritas moneter agar tingkat suku bunga SPN 3 bulan juga dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi perbankan dalam menetapkan margin yang wajar untuk suku bunga kredit.

Penurunan tingkat bunga SPN 3 bulan akan diupayakan melalui pendalaman pasar SBN domestik dan bekerja sama dengan otoritas moneter dalam mengendalikan inflasi. Namun sebagaimana instrumen pasar keuangan lainnya, pergerakan tingkat bunga SPN 3 bulan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang berada di luar kendali Pemerintah seperti kondisi perekonomian global dan perubahan sentimen investor.

### **Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,**

Selanjutnya kami akan menanggapi pandangan F-PKS dan F-Hanura tentang perlunya penelaahan lebih dalam terhadap asumsi harga minyak Indonesia, serta pandangan F-PPP terkait target Pemerintah terhadap harga ICP di bawah US\$100 per barel, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Perkiraan harga minyak Indonesia sebesar US\$75,0-95,0 per barel pada tahun 2012 didasarkan pada berbagai pertimbangan termasuk aspek-aspek fundamental yang mempengaruhi harga minyak dunia. Pertama, permintaan minyak dunia relatif stabil pada tahun 2012 yang didukung oleh perkiraan menurunnya pertumbuhan ekonomi China dan India dibandingkan tahun 2011 yaitu masing-masing dari 9,6 persen dan 8,2 persen pada tahun 2011 menjadi 9,5 persen dan 7,8 persen pada tahun 2012 (WEO April 2011). Kedua, persediaan dan distribusi minyak dunia diperkirakan akan cenderung stabil yang diikuti dengan tingginya tingkat kedisiplinan negara anggota OPEC untuk menjaga kapasitas produksi minyak. Ketiga, perkiraan Badan Energi Amerika (EIA) terkait harga minyak dunia tahun 2012 pada bulan Mei 2011 telah menurun jika dibandingkan perkiraan pada bulan

April 2011. Harga minyak kedepan (*Future price*) juga cenderung menurun pada tahun 2012. Turunnya perkiraan tersebut seiring dengan pergerakan harga komoditas di pasar dunia yang mengalami penurunan. Keempat, rencana kenaikan produksi minyak mentah negara-negara Non OPEC dan meredanya permasalahan geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada penurunan harga minyak mentah. Kelima, harga minyak WTI untuk penyerahan Juli 2011 turun menjadi sekitar US\$100 per barel dibandingkan pada bulan April 2011 sebesar US\$110 per barel dan minyak Brent juga turun sekitar US\$115 per barel dibandingkan April 2011 sebesar US\$123 per barel, yang didorong oleh penurunan permintaan minyak dunia karena tingginya harga minyak dan melemahnya pemulihan ekonomi negara-negara maju. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perkiraan harga minyak ICP tahun 2012 sekitar US\$75-US\$95 per barel.

Menanggapi pandangan F-PKS dan F-PG, terkait asumsi target *lifting* minyak Indonesia yang menunjukkan kemunduran dan stagnasi, serta pandangan F-Hanura dan F-PPP terkait penyesuaian target *lifting* 2012 seiring penurunan *lifting* yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Perkiraan *lifting* minyak Indonesia sebesar 950-970 ribu barel per hari pada tahun 2012 ditetapkan dengan memperhatikan, pertama, rencana investasi migas menunjukkan tren peningkatan. Kedua, optimalisasi produksi minyak di blok Cepu pada tahun 2012. Ketiga, adanya tambahan lapangan minyak baru. Keempat, adanya temuan cadangan minyak baru.

Pada tahun 2012, diperkirakan masih ada beberapa permasalahan yang menghambat tercapainya target produksi minyak antara lain penurunan produksi alamiah sumur-sumur dan *unplanned shutdown* seperti kebocoran pipa gas, cuaca buruk, masalah undang-undang lingkungan hidup, otonomi daerah, lokal konten, masalah perizinan dan koordinasi antarbirokrasi. Sebagai antisipasi, Pemerintah juga melakukan beberapa langkah strategis dalam pencapaian target *lifting* 2012, diantaranya yaitu: meningkatkan kehandalan peralatan produksi dengan *preventive/predictive maintenance* untuk mengurangi *unplanned shutdown*, meningkatkan efisiensi operasi dan optimasi fasilitas produksi, meningkatkan upaya optimasi lapangan produksi dan pengembangan lapangan, termasuk percepatan produksi sumur temuan eksplorasi untuk mengurangi laju penurunan produksi alamiah yang awalnya 12% menjadi hanya 7% melalui penerapan *Enhanced Oil Recovery*, reaktivasi lapangan *idle* dan peremajaan peralatan dan fasilitas produksi, serta meningkatkan koordinasi untuk penyelesaian masalah yang terkait dengan regulasi, perijinan dan tumpang tindih lahan.

#### **Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,**

Kami sependapat dengan masukan dari F-PAN, F-PG, F-Hanura, F-PKS, dan F-PDIP mengenai perlunya Pemerintah untuk lebih mengoptimalkan penerimaan perpajakan melalui upaya ekstensifikasi perpajakan, termasuk di dalamnya perluasan basis pajak, intensifikasi

perpajakan, dan upaya lainnya. Terkait dengan masukan tersebut kami telah dan akan senantiasa melakukan berbagai upaya untuk terus memperbaiki sistem, administrasi, dan regulasi perpajakan guna mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara melalui reformasi di bidang administrasi perpajakan, peraturan perundang-undangan, serta pengawasan dan penggalan potensi. Dalam pelaksanaannya, ketiga agenda reformasi tersebut diwujudkan dalam berbagai langkah dan kegiatan, termasuk diantaranya pengalihan BPHTB dan PBB sektor perkotaan dan perdesaan ke pemerintah daerah, serta pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Selain itu, juga akan terus diupayakan mengoptimalkan penggalan potensi penerimaan melalui peningkatan kualitas pemeriksaan, penagihan maupun penyempurnaan mekanisme keberatan dan banding.

Mengenai pandangan dari F-Hanura, F-PKS, F-PDIP dan F-PKB terkait perlunya Pemerintah memberi perhatian besar terhadap kasus-kasus perpajakan, termasuk mafia pajak dan kasus penggelapan pajak, serta mengantisipasi kebocoran penerimaan, dapat diberikan tanggapan berikut. Kita mempunyai keinginan dan upaya yang kuat untuk menyelesaikan dan membenahi secara terstruktur permasalahan perpajakan yang masih terjadi, termasuk kasus mafia dan penggelapan pajak. Beberapa pihak telah diajak Kementerian Keuangan bekerjasama untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan didukung oleh lembaga-lembaga tersebut, diharapkan kasus-kasus perpajakan dapat diselesaikan sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengamankan pencapaian target penerimaan perpajakan.

Sehubungan dengan pandangan F-PKB, F-PKS, dan F-Gerindra untuk meningkatkan *tax ratio* yang optimal dalam tahun 2012, dapat disampaikan sebagai berikut. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah nyata dan terus melakukan perbaikan untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalkan pemungutan penerimaan perpajakan. Langkah-langkah optimalisasi perpajakan tersebut dilakukan terstruktur dan berkesinambungan, mulai dari pembenahan pelayanan dan administrasi, peningkatan dan perluasan basis pajak, penyusunan data pajak yang terintegrasi, perbaikan regulasi perpajakan, serta peningkatan pengawasan pemungutan pajak. Sebagai hasilnya, telah berhasil ditingkatkan penerimaan perpajakan sehingga mencapai Rp2.923,2 triliun pada periode 2006-2010, jauh melonjak dari pencapaian periode 2001-2005 yang sebesar Rp1.265,2 triliun. Dalam tahun 2011 dan 2012, Pemerintah berkeyakinan penerimaan perpajakan akan terus dapat ditingkatkan secara optimal. Optimisme tersebut didukung dengan upaya penggalan potensi perpajakan, dan didukung pula oleh semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional.

### **Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,**

Menanggapi pendapat dari F-PDIP mengenai kebijakan subsidi ke depan. Pada prinsipnya penyediaan anggaran subsidi dalam APBN diarahkan untuk mempertahankan kesejahteraan

rakyat, meringankan beban masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasar dengan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dan menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Sampai saat ini, Pemerintah tidak merencanakan untuk menghapus subsidi, mengingat subsidi tetap dibutuhkan untuk rakyat miskin dan petani yang memang layak dan tepat menerimanya. Namun demikian, pengendalian anggaran subsidi ke depan perlu dilakukan, mengingat kecenderungan terus meningkatnya beban subsidi setiap tahun yang mengakibatkan semakin terbatasnya ruang gerak fiskal untuk membiayai belanja pembangunan, serta alokasi subsidi (terutama subsidi BBM dan subsidi listrik) saat ini masih belum memenuhi prinsip keadilan. Ke depan, Pemerintah akan berupaya mengendalikan subsidi secara bertahap, antara lain melalui penataan ulang kebijakan subsidi agar makin adil dan tepat sasaran. Subsidi juga akan lebih diarahkan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya (*targeted subsidy*), hal tersebut sejalan dengan pendapat dari F-PAN, F-PD, dan F-PKS. Berdasarkan hal tersebut, maka pada tahun 2012, kebijakan subsidi diarahkan dengan : (i) menata ulang kebijakan dan sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel dan tepat sasaran; (ii) menyusun sistem seleksi yang ketat untuk menentukan sasaran penerima subsidi dengan menggunakan basis data yang *valid*; (iii) pengendalian konsumsi BBM melalui penyaluran konsumsi BBM secara tertutup dengan cara bertahap sesuai target sasaran; (iv) melanjutkan program konversi minyak tanah ke LPG, serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan; (v) pengendalian subsidi listrik melalui pemberian subsidi kepada konsumen yang lebih tepat sasaran, optimalisasi penggunaan sumber energi input pembangkit listrik non BBM, serta percepatan pembangunan proyek pembangkit listrik 10.000 MW tahap I dan II; dan (vi) mengarahkan subsidi pertanian lebih tepat sasaran dan mendukung peningkatan produktifitas pertanian.

#### **Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,**

Terhadap pandangan F-Hanura, F-PG, F-PAN dan F-PKB yang mengharapkan alokasi anggaran belanja negara tahun 2012 dapat ditingkatkan lebih besar, dapat kiranya disampaikan jawaban berikut. Selama kemampuan keuangan negara memang memungkinkan, Pemerintah pasti akan terus berupaya agar volume belanja negara dapat meningkat signifikan setiap tahun. Hal ini dapat dibuktikan bila dilihat dari perkembangan realisasi belanja negara yang terus meningkat, dari sebesar Rp509,6 triliun pada tahun 2005 menjadi sekitar Rp1.062,9 triliun pada tahun 2010, dan direncanakan sebesar Rp1.229,6 triliun dalam APBN 2011. Sejalan dengan semakin membesarnya kue pembangunan tersebut, maka alokasi anggaran untuk program-program kesejahteraan rakyat, pemberdayaan UMKM, dan belanja modal juga diupayakan meningkat. Hal itu sangat penting karena program-program pembangunan tersebut dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat, serta sangat strategis untuk mengakselerasi laju pembangunan setiap tahun.

Dalam tahun mendatang, kebutuhan peningkatan belanja negara memang sangat mendesak dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam jangka pendek dan panjang, yaitu peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, serta pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Untuk memenuhi kebutuhan belanja yang lebih besar tersebut, Pemerintah mengutamakan dari optimalisasi sumber-sumber pendapatan dalam negeri, dengan didukung penerbitan surat utang negara serta pinjaman luar negeri. Guna menyeimbangkan antara kebutuhan peningkatan belanja negara tersebut, serta melihat kemampuan optimalisasi pendapatan negara dan mengendalikan tambahan utang pada batas yang aman, maka defisit anggaran tahun 2012 direncanakan berkisar pada tingkat 1,4-1,6% terhadap PDB.

Mengenai permintaan dari F-PDIP agar lebih ditingkatkan kesejahteraan rakyat dengan menambah belanja-belanja yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan riil rakyat, selama ini telah menjadi perhatian Pemerintah. Namun, perlu disadari bahwa tetap harus dijaga agar kesejahteraan yang diterima rakyat tidak sebatas memperoleh kebutuhan pokok, tetapi juga dalam mendapatkan akses untuk kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan berusaha. Oleh sebab itu, perlu dijaga keseimbangan antara belanja bantuan sosial dan subsidi dengan belanja-belanja produktif yang mampu memberikan multiplier effect yang lebih luas, sehingga mampu meningkatkan kemampuan usaha atau penyediaan lapangan kerja. Kita tetap berupaya agar anggaran belanja pemerintah pusat dapat efektif dan efisien, agar mampu memberikan dampak langsung dalam peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja bagi rakyat.

Menyangkut pembatasan anggaran pembangunan gedung pemerintah, biaya perjalanan dinas, biaya kegiatan seremonial dan anggaran tidak mendesak lainnya, hal tersebut juga sudah merupakan kebijakan Pemerintah, sebagaimana disampaikan dalam Kerangka ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2012. Dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara akan dilakukan pembatasan kegiatan, diantaranya untuk pembangunan gedung yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi K/L dan bersifat tidak mendesak.

Walaupun tanpa harus diikat dengan alokasi anggaran dalam persentase tertentu, Pemerintah sependapat pandangan F-Gerindra dan F-PAN untuk meningkatkan anggaran pembangunan untuk infrastruktur dan energi. APBN sebagai instrumen fiskal yang utama harus benar-benar mempunyai ruang gerak fiskal yang cukup luas untuk melakukan akselerasi pembangunan. Semakin besar *mandatory spending* yang ada, maka akan mengurangi fleksibilitas bagi Pemerintah untuk melakukan upaya-upaya yang tepat dan cepat dalam merespon dinamika pembangunan yang berkembang pada satu kurun waktu atau periode tertentu.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kualitas belanja negara, salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung pembangunan

infrastruktur dalam rangka mendukung koridor ekonomi dan keterhubungan wilayah. Dukungan untuk pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing investasi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas lapangan kerja, yang pada akhirnya dapat mempercepat upaya pengurangan tingkat pengangguran. Namun demikian, upaya ke arah tersebut harus dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan kesinambungan fiskal. Peningkatan “*domestic connectivity*” serta “*domestic interconnectivity*” dalam pelaksanaannya juga harus mempertimbangkan kendala yang dihadapi selama ini, seperti pembebasan lahan, ketersediaan bahan baku, dan kelayakan kontraktor, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai dan tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan.

Terhadap masukan F-PKS untuk lebih cepat lagi mengurangi target tingkat pengurangan pengangguran dan kemiskinan dapat kami sampaikan bahwa target tersebut harus diperhitungkan dengan lebih realistis. Sasaran tingkat pengangguran dan kemiskinan yang lebih rendah lagi hendak dicapai oleh Pemerintah pada tahun 2012, didasarkan oleh kondisi aktual kedua indikator tersebut pada akhir tahun 2010, langkah-langkah pencapaian yang akan dilakukan pada tahun 2011, serta program pembangunan yang hendak dijalankan di tahun 2012.

Sejak tahun 2011, strategi yang ditempuh Pemerintah untuk pengentasan kemiskinan diperluas menjadi 4 (empat) klaster. Klaster 1, lebih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, antara lain melalui program Jamkesmas, Raskin, PKH, bea siswa bagi siswa miskin. Klaster 2, di fokuskan untuk melibatkan masyarakat miskin dalam kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan dan menjaga kesinambungan pendapatan masyarakat miskin melalui PNPM. Klaster 3, di fokuskan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin dalam memperoleh pendanaan untuk usaha melalui KUR. Klaster 4, difokuskan untuk memenuhi kebutuhan yang terjangkau oleh masyarakat miskin, antara lain rumah sangat murah, angkutan umum murah, dan listrik murah.

#### **Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,**

Terhadap pandangan F-PG, F-PAN, F-PDIP, F-PKB dan F-PD terkait kebijakan transfer ke daerah dapat disampaikan sebagai berikut.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah selalu berupaya untuk terus meningkatkan alokasi transfer ke daerah. Sampai dengan tahun 2011 alokasi transfer ke daerah mencapai Rp393,0 triliun atau 32,0 persen dari total belanja negara, yang menunjukkan peningkatan signifikan dari alokasi di tahun 2005 sebesar Rp153,4 triliun atau 27,2 persen dari belanja negara.

Berkaitan dengan alokasi anggaran untuk desa dapat kami jelaskan sebagai berikut. Selama ini, Pemerintah telah mengalokasikan dana pembangunan kawasan perdesaan melalui APBN, antara lain dalam belanja bantuan sosial seperti PNPM Mandiri sepanjang 2005-2011. Beberapa kegiatan prioritas dalam program PNPM, antara lain:

- Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan;
- Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah/Penangulangan Kemiskinan;
- Perkotaan (dengan sasaran termasuk wilayah desa/kelurahan);
- PNPM Infrastruktur Perdesaan;
- PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

Selain itu, pendanaan untuk pembangunan kawasan perdesaan juga dilakukan melalui dana alokasi khusus dan dana penyesuaian, yang setiap tahun cenderung mengalami kenaikan.

Kemudian, Pemerintah sepakat dengan usulan F-Gerindra untuk menyempurnakan peraturan perundangan tentang pelaksanaan desentralisasi fiskal. Untuk revisi UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah menyelesaikan grand design desentralisasi fiskal sampai dengan tahun 2030 dan naskah akademis revisi UU No 33 Tahun 2004. Penyempurnaan yang dilakukan direncanakan bukan saja pada substansi yang menyangkut alokasi dana perimbangan, tetapi juga diupayakan untuk mengharmonisasikan pelaksanaan UU tersebut dengan peraturan perundangan yang terkait lainnya, baik yang bersifat sektoral maupun aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai administrasi pemerintahan di pusat dan daerah.

### **Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,**

Selanjutnya kami akan menanggapi pertanyaan dan pandangan dari F-PKS, F-PAN, dan F-PG terkait kebijakan defisit dan pembiayaan.

Pemerintah akan sangat memperhatikan masukan yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat untuk lebih berhati-hati memanfaatkan pembiayaan utang, agar dapat betul-betul bermanfaat bagi pembangunan dan dikelola secara hati-hati. Untuk itu, kebijakan pengendalian defisit merupakan salah satu strategi untuk mendukung upaya pengendalian/pengurangan pendanaan dari utang tersebut. Selain itu, strategi lain yang terus dilakukan adalah memanfaatkan secara optimal sumber pembiayaan dari dalam negeri, seperti dana SAL, hasil pengelolaan aset, dan dari rekening dana investasi.

Kalaupun pembiayaan utang tetap dibutuhkan sebagai sumber alternatif terakhir untuk membiayai defisit APBN, maka pengelolaannya akan diarahkan antara lain dengan:

1. Memenuhi target penerbitan SBN dan penarikan pinjaman dengan memperhatikan biaya dan risiko utang yang paling minimal;

2. Menetapkan target penerbitan SBN sesuai dengan kapasitas daya serap pasar dan perkembangan kondisi pasar keuangan;
3. Meningkatkan proses bisnis pengadaan pinjaman melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai PP Nomor 10 tahun 2011;
4. Menurunkan *ratio* utang terhadap PDB secara konsisten.

Menanggapi pandangan perlunya kebijakan defisit anggaran tahun 2012 yang lebih besar dari kisaran 1,4-1,6% terhadap PDB, Kami melihat banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam mendisain arah kebijakan defisit pada tahun mendatang. Pertama, memperhitungkan kemampuan kolektivitas sumber-sumber penerimaan negara yang optimal dalam tahun 2012, serta kebutuhan pendanaan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran yang telah direncanakan, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Kedua, pengendalian tambahan utang, baik dari dalam maupun dari luar negeri, karena dengan target defisit yang lebih tinggi akan berpotensi meningkatkan tambahan utang. Ketiga, menjaga konsistensi perencanaan APBN jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJM tahun 2010-2014, melalui strategi pengurangan defisit anggaran secara bertahap ke tahun 2014.

Dengan demikian, penyusunan arah defisit anggaran pada tahun 2012 telah memperhitungkan faktor-faktor tersebut di atas secara komprehensif dan diupayakan tidak menimbulkan risiko bagi pengelolaan APBN ke depan. Upaya untuk menjaga kesinambungan fiskal tersebut perlu diimbangi dengan:

1. Kebijakan pembiayaan defisit yang dilakukan dengan memperhatikan pencapaian kemandirian bangsa dengan melakukan pengurangan stok utang, baik utang dalam negeri maupun luar negeri.
2. Pembiayaan utang melalui pengadaan pinjaman akan lebih memprioritaskan sumber dari domestik dibandingkan dari luar negeri. Pengadaan pinjaman luar negeri akan mengutamakan pinjaman yang berasal dari kreditor multilateral dan bilateral, terutama terhadap komitmen pinjaman yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, akan dimaksimalkan penggunaannya untuk kegiatan prioritas yang memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
3. Dalam rangka diversifikasi instrumen pembiayaan utang yang potensial, saat ini sedang disiapkan infrastruktur dan suprastruktur dalam mendukung proses penerbitan SBSN dengan *underlying project (project-based sukuk)*.

**Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,**

Demikianlah jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Dewan Perwakilan Rakyat berkenaan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam

rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2012. Tanggapan atas Pemandangan Umum DPR lebih lanjut akan kami sampaikan secara tertulis, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang telah kami sampaikan ini.

Akhirnya atas nama Pemerintah, kami menyambut baik ajakan Dewan yang terhormat untuk bersama-sama melakukan pembahasan dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2012 secara lebih mendalam dan cermat pada tahap selanjutnya, atas dasar prinsip kemitraan dan tanggung jawab bersama dalam mengemban amanat rakyat, sehingga kewajiban mulia yang terbentang di pundak Pemerintah dan Dewan dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

**Sekian dan terima kasih.**

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

**Jakarta, 31 Mei 2011**

**A.N. PEMERINTAH  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**AGUS D.W. MARTOWARDOJO**